

KLIPING BERITA MEDIA MASSA

Selasa, 3 Desember 2019



BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

KATA PENGANTAR

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Bisnis Indonesia Halaman 7	Selasa, 3 Desember 2019	Tarif Zamp Tunggu Regulasi Mendagri	Padahal, layanan tersebut merupakan layanan air minum tertinggi yang seharusnya mampu diberikan PDAM kepada masyarakat. Berbeda dengan layanan umum yang diberikan PDAM, melalui layanan Zona Air Minum Prima (ZAMP), air yang dialirkan ke rumah-rumah pelanggan sudah layak dikonsumsi.
2	Bisnis Indonesia Halaman 7	Selasa, 3 Desember 2019	HK Genjot Penyelesaian Proyek Trans-Sumatra	Hutama Karya (Persero) terus menggenjot pembangunan jalan tol Trans Sumatra setelah sukses merampungkan dua ruas di Sumatra bagian selatan, yaitu tol Bakauheni-terbanggi Besar (140,9 kilometer) dan Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung (189 kilometer).
3	Bisnis Indonesia Halaman 7	Selasa, 3 Desember 2019	Revisi Aturan Tuntas Awal 2020	Aturan terkait perluasan fungsi rest area diperkirakan bisa selesai pada awal tahun depan. Perluasan fungsi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada para pengguna jalan tol.
4	Media Indonesia Halaman 10	Selasa, 3 Desember 2019	Tol di Riau Beroperasi Maret 2020	Tol ruas Pekanbaru-Dumai Riau, sepanjang 131 kilometer (km) siap beroperasi penuh pada maret 2020. Di sekitar tol dibangun enam pelintasan gajah karena daerah tersebut merupakan wilayah jelajah gajah.
5	Media Indonesia Halaman 14	Selasa, 3 Desember 2019	Giliran BUMN Jadi Fasilitator di Infrastruktur	Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menyebut kebutuhan pembiayaan infrastruktur di Indonesia tidak lagi hanya dapat dipenuhi sektor publik.
6	Bisnis Indoensia Halaman 21	Selasa, 3 Desember 2019	Berita Foto	Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kanan) Bersama Menteri perhubungan Budi Karya Sumadi (kedua kanan), Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas) Marsekai Madya TNI Bagus Puruhito (kiri) dan Sekretaris Utama BMKG Dwi Budi Sutrisno (kedua kiri) mengikuti Rapat Kerja dengan komisi V DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/12). Raker tersebut membahas kesiapan infrastruktur dan transportasi dalam rangka persiapan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020.
7	Bisnis Indonesia Halaman 23	Selasa, 3 Desember 2019	Berlomba Lewat Mitra Asing	Tak ingin di anggap sekedar latah untuk mengikuti tren yang berkembang, para pengembangan property juga menunjukkan keserikusannya membangun kota pintar dengan menggandeng perusahaan teknologi yang dianggap lebih berpengalaman, di antaranya adalah PT Lippo Karawaci Tbk,, Indonesia Tbk,, Dan PT Sirius Surya

				Sentosa.
8	Bisnis Indonesia Halaman 23	Selasa, Desember 2019	3 Dana Talangan FLPP Segera Cair	Dana talangan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) senilai Rp2 Triliun sudah siap digulirkan dari PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) sebagai bank penyaluran ke pengembangan.

Judul	Tarif Zamp Tunggu Regulasi Mendagri	Tanggal	Selasa, 3 Desember 2019
Media	Bisnis Indonesia Halaman 7		
Resume	Padahal, layanan tersebut merupakan layanan air minum tertinggi yang seharusnya mampu diberikan PDAM kepada masyarakat. Berbeda dengan layanan umum yang diberikan PDAM, melalui layanan Zona Air Minum Prima (ZAMP), air yang dialirkan ke rumah-rumah pelanggan sudah layak dikonsumsi.		

► LAYANAN AIR MINUM

Tarif ZAMP Tunggu Regulasi Mendagri

Bisnis, JAKARTA — Sejumlah perusahaan daerah air minum kini sudah melayani pelanggan Zona Air Minum Prima (ZAMP). Sayangnya tarif air layak minum tersebut masih disamakan dengan tarif pelanggan biasa, karena ketiadaan regulasi.

Aprianus Doni T
redaksi@bisnis.com

Padahal, layanan tersebut merupakan layanan air minum tertinggi yang seharusnya mampu diberikan PDAM kepada masyarakat. Berbeda dengan layanan umum yang diberikan PDAM, melalui layanan Zona



Air Minum Prima (ZAMP), air yang dialirkan ke rumah-rumah pelanggan sudah layak dikonsumsi.

Belum adanya regulasi yang mengatur tarif untuk layanan ZAMP membuat PDAM Tirta Kahuripan, di Kabupaten Bogor, masih menyamakan tarif para pelanggan ZAMP dengan pelanggan di luar layanan tersebut.

"Kami [PDAM Tirta Kahuripan] menyediakan 18 kubik per bulan per rumah tangga [di perumahan Mutiara Sentul, Kabupaten Bogor] dengan tarif Rp8.400 per kubik. Itu masih sama dengan tarif pelanggan di luar ZAMP," ujar Direktur Utama PDAM Tirta Kahuripan Hasanudin

Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) telah mengevaluasi 380 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Penyelenggara SPAM ini dari 391 BUMD Penyelenggara SPAM. Hasilnya ada 52 perusahaan yang dianggap sakit, tetapi banyak pula yang sudah sehat.

10 PDAM Dengan Kinerja Terbaik 2019

BUMD Penyelenggara SPAM	Nilai Kinerja	Jumlah Pelanggan
PDAM Tirta Kerta Raharja, Kabupaten Tangerang	4,27	145,738
PDAM Tirta Kahuripan, Kabupaten Bogor	4,19	144,411
PDAM Tirta Pakuan, Kota Bogor	4,18	159,290
PDAM Kabupaten Buleleng	4,14	51,935
PDAM Surya Sembada, Kota Surabaya	4,13	562,381
PDAM Tirta Raharja, Kabupaten Bandung	4,07	97,329
PDAM Kabupaten Jember	4,07	36,446
PDAM Kabupaten Batang	4,02	46,189
PDAM Kabupaten Banyuwangi	3,99	55,878
PDAM Tirta Asasta, Kota Depok	3,99	60,361

Sumber: BPPSPAM.

BISNIS/TRI UTOMO

Tahir, pekan lalu.

Menurutnya, pihaknya belum bisa menaikkan tarif para pelanggan layanan ZAMP karena masih menunggu Menteri Dalam Negeri merilis Peraturan Menteri terkait penarifan air minum tersebut.

Saat ini, diketahui baru delapan PDAM yang telah menyelenggarakan layanan ZAMP di sejumlah titik yakni PDAM Kabupaten Bogor, PDAM Malang, PDAM Tirtanadi Medan, PDAM Kota Tangerang, PDAM Kota Bogor, PDAM Buleleng, PDAM Intan Banjar, dan PDAM Padang Panjang.

Melihat kinerja tahunan PDAM yang terus membaik, Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) pun optimistis mencapai target 37 PDAM menyelenggarakan ZAMP hingga 2024.

Kepala BPPSPAM, Bambang Sudiarto mengatakan bahwa ZAMP merupakan bentuk layanan air minum tertinggi yang dapat diberikan BUMD Penyelenggara SPAM. Namun, dia mengakui bahwa untuk bisa menyelenggarakan ZAMP tidaklah mudah.

"Sebab dalam memberikan layanan ZAMP, PDAM harus secara berkelanjutan memelihara sistem produksi sampai ke sistem distribusinya agar air yang keluar dari keran pelanggan dapat langsung diminum," ujarnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Persatuan Perusahaan Air Minum Indonesia (Perpamsi) Benny Andrianto. Menurutnya, syarat yang paling sulit untuk dipenuhi PDAM dalam menciptakan ZAMP adalah kontinuitas.

"Yang dimaksud ZAMP itu seharusnya air mengalir 24 jam tanpa henti. Kalau air sempat berhenti dengan berbagai alasan, itu tidak bisa disebut zona air minum prima," ujarnya kepada *Bisnis*.

PAM JAYA

Sementara itu, PDAM DKI Jakarta atau PAM Jaya tidak masuk dalam daftar 10 Besar PDAM Nasional ter-sehat pascaevaluasi tahunan oleh

► PDAM belum bisa menaikkan tarif para pelanggan layanan ZAMP karena masih menunggu Menteri Dalam Negeri merilis Peraturan Menteri terkait penarifan air minum tersebut.

BPPSPAM. Pertumbuhan pelanggan yang masih lemah menjadi sorotan PAM Jaya, kendati mereka masuk ke dalam kategori PDAM yang memiliki lebih dari 100.000 pelanggan.

Anggota BPPSPAM Unsur Penyelenggara Kementerian PUPR, Henry M. Limbong mengatakan bahwa PAM Jaya hanya mendapat nilai 3,21 dan menempatkannya pada urutan ke-111 dari 380 BUMD penyelenggara SPAM.

"Sedangkan untuk kelompoknya yang di atas 100.000 pelanggan berada di urutan ke-19. Jadi yang dimasukkan ke sini hanya 10 besarnya [10 BUMD Penyelenggara SPAM Peringkat Tertinggi Nilai Kinerja 2019]," ujarnya.

Pencapaian nilai tersebut tidak lepas dari hasil evaluasi BPPSPAM pada kinerja PAM Jaya yang dinilai masih kurang untuk beberapa indikator, salah satunya pertumbuhan pelanggan yang masih minim. Anggota BPPSPAM Unsur Profesi, Popy Indrawati Janto menambahkan bahwa PAM Jaya hanya mengalami pertumbuhan pelanggan sekitar 1%-1,5% per tahunnya.

Henry M. Limbong menambahkan bahwa cakupan PAM Jaya, yang dikelola oleh dua operator yakni Aetra dan Palya, baru mencapai 60% atau sekitar 860.000 pelanggan dan harus ditingkatkan.

Keterbatasan air baku menjadi salah satu alasan minimnya pertumbuhan pelanggan di BUMD penyelenggara SPAM DKI Jakarta ini.

"Mudah-mudahan dengan itu [proyek SPAM Jatiluhur 1] mungkin dua tahun lagi, mereka bisa menambah pelanggan," imbuhnya.

Direktur PAM Jaya, Priyatno Bambang Hernowo menjelaskan bahwa pada Aspek Keuangan, nilai RoE yang rendah disebabkan ekuitas PAM JAYA

masih negatif sampai dengan 2018. "Namun, pada 2019, PAM Jaya mulai mencatatkan ekuitas positif sehingga ke depannya akan diperoleh nilai RoE positif," ujarnya kepada *Bisnis*, Senin (2/12)

Sedangkan untuk aspek pelayanan, lanjutnya, terdapat penurunan yang signifikan dalam hal Cakupan Layanan, dari 62,22% pada 2018 menjadi 28,05% di tahun ini.

Menurutnya, hal tersebut karena ada perubahan metode penghitungan cakupan layanan yang digunakan oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) berdasarkan formulasi dari BPPSPAM. Walhasil, terjadi penurunan nilai secara keseluruhan.

Saat ini, Priyatno mengakui bahwa pihaknya sedang melakukan diskusi dan klarifikasi dengan BPPSPAM dan BPKP serta Badan Pusat Statistik mengenai metode yang digunakan untuk menghitung cakupan layanan.

Kemudian, terkait pertumbuhan pelanggan yang masih minim, yakni pencapaian pelanggan baru dibandingkan pelanggan eksisting hanya 1,4%, penyebab utamanya adalah ketersediaan air distribusi dan kemauan warga untuk menjadi pelanggan PAM yang juga masih kecil.

Terakhir, NRW atau kehilangan air di DKI Jakarta yang masih di level 43,4%, sekitar 80%-nya disebabkan karena kehilangan air fisik seperti bocor di perpipaian.

Priyatno pun menargetkan PAM Jaya akan mengalami pertumbuhan cakupan layanan dari 62% pada tahun ini menjadi 82% pada 2023.

"Beberapa inisiatif yang dilakukan adalah dengan penambahan pasokan air baku dan air curah, penurunan NRW, serta pembangunan kios air, dengan rincian penambahan pelanggan per tahun," paparnya.

Adapun total peningkatan pelanggan dari SPAM Jatiluhur adalah sebesar 200 ribu, dengan cakupan bertambah 14% dan dari Buaran III adalah sebesar 165.000 atau menambah cakupan 11%. □

Judul	HK Genjot Penyelesaian Proyek Trans-Sumatra	Tanggal	Selasa, 3 Desember 2019
Media	Bisnis Indonesia Halaman 7		
Resume	Hutama Karya (Persero) terus menggenjot pembangunan jalan tol Trans Sumatra setelah sukses merampungkan dua ruas di Sumatra bagian selatan, yaitu tol Bakauheni-terbanggi Besar (140,9 kilometer) dan Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung (189 kilometer).		

► JALAN TOL

HK Genjot Penyelesaian Proyek Trans-Sumatra

Bisnis, JAKARTA — PT Hutama Karya (Persero) terus menggenjot pembangunan jalan tol Trans Sumatra setelah sukses merampungkan dua ruas di Sumatra bagian Selatan, yaitu tol Bakauheni-Terbanggi Besar (140,9 kilometer) dan Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung (189 kilometer).

Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Muhammad Fauzan mengatakan pengoperasian ruas Bakauheni-Terbanggi Besar dan Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung membuat waktu tempuh Bakauheni ke Palambang dan sebaliknya hanya 4–5 jam. Hutama Karya, katanya, juga fokus mengerjakan ruas-ruas prioritas lain. Secara keseluruhan, ada 24 ruas sepanjang 2.765 kilometer yang ditugaskan kepada Hutama Karya

Fauzan menuturkan, di Sumatra bagian Tengah, Hutama Karya menargetkan pengoperasian ruas Pekanbaru-Dumai (131 kilometer) pada Maret 2020. "Proyek ini terbagi menjadi 6 seksi dengan progres pembangunan konstruksi rata-rata mencapai 77 persen. Seksi 1 sepanjang 9,50 kilometer Insyaallah bisa selesai akhir tahun

ini," jelasnya, Senin (2/12).

Dia menerangkan, seksi 2, seksi 3, dan seksi 4 masih dalam tahap penyelesaian pembebasan lahan sedangkan konstruksi di seksi 5 dan seksi 6 sudah bisa dikebut karena seluruh lahan telah dibebaskan. Selain jalan tol, di ruas Pekanbaru-Dumai juga dibangun enam pelintasan untuk kewanan gajah.

Sementara itu, pada ruas Pekanbaru-Padang (255 kilometer), tahapan konstruksi telah dimulai di seksi 5 Padang-Sicincin sepanjang 29 kilometer. "Saat ini dalam tahap pembebasan lahan dan diharapkan pada 2020 kami dapat melakukan pembangunan konstruksi penuh," terang Fauzan.

Di Aceh, pembebasan lahan untuk proyek Sigli-Banda Aceh (74 kilometer) terus berjalan dan secara paralel telah dimulai pekerjaan konstruksi. Fauzan menyebut, di seksi 4 Indrapuri-Blangbintang (13,5 kilometer), pembebasan lahan hampir tuntas. Jalan tol Sigli-Banda Aceh merupakan bagian dari pembangunan jalan tol di koridor Medan-Banda Aceh sejauh 470 kilometer. *(Rivki Maulana)*

Judul	Revisi Aturan Tuntas Awal 2020	Tanggal	Selasa, 3 Desember 2019
Media	Bisnis Indonesia Halaman 7		
Resume	Aturan terkait perluasan fungsi rest area diperkirakan bisa selesai pada awal tahun depan. Perluasan fungsi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada para pengguna jalan tol.		

► PERLUASAN FUNGSI REST AREA

Revisi Aturan Tuntas Awal 2020

Bisnis, JAKARTA — Aturan terkait perluasan fungsi *rest area* diperkirakan bisa selesai pada awal tahun depan. Perluasan fungsi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada para pengguna jalan tol.

“Jadi itu [perluasan fungsi *rest area*] untuk meningkatkan fungsi atau upaya pelayanan. Nanti kualitas dari *rest area* atau TIP jadi meningkat secara kelasnya. Semoga awal tahun sudah bisa [dikeluarkan aturan barunya],” ujar Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sugiyartanto, pekan lalu.

Rest area atau tempat istirahat dan pelayanan atau TIP, katanya, akan ditingkatkan kualitas layanannya menjadi destinasi wisata; menjadi kawasan transit antarmoda; sebagai *logistics hub* dan *rest area* yang

terintegrasi dengan kawasan ekonomi.

Adapun untuk melakukan hal tersebut revisi harus dilakukan pada Peraturan Menteri PUPR No. 10/PRT/M/2018 tentang Tempat Istirahat dan Pelayanan pada Jalan Tol. Selain meningkatkan kualitas pelayanan kepada para pengguna jalan tol, perluasan fungsi tempat istirahat ini diharapkan juga akan menarik minat investor di sektor tersebut.

Sementara itu, Kementerian PUPR melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) menyerahkan sementara tempat istirahat terpadu atau *rest area* di Bendungan Tugu kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Kepala BPIW Hadi Suhayono mengatakan aset *rest area* diserahkan kepada Pemprov Jatim untuk mempercepat pemanfaatan tempat tersebut seiring pe-

nyelesaian Bendungan Tugu.

Dia menambahkan, tempat istirahat di Bendungan Tugu diharapkan bisa menyokong pengembangan kegiatan usaha di wilayah Kabupaten Trenggalek. Pihaknya bersama Pemprov Jatim juga tengah menyusun rencana pengembangan beragam infrastruktur di Lawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Bromo-Tengger-Semeru.

“Kami akan senantiasa bersinergi dengan Pemprov Jatim dalam upaya melakukan percepatan pengembangan infrastruktur dan wilayah di Jatim,” terangnya dalam rilisnya, Jumat (29/11).

Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak, pembangunan infrastruktur di wilayah Jatim memerlukan partisipasi banyak pihak. Salah satu fokus pengembangan infrastruktur di Jatim adalah KSPN Bromo-Tengger-

-Semeru.

“Seperti apa desain pengembangannya, ke wilayah mana fokus pengembangannya. Nah itu salah satu yang melakukan kajiannya adalah BPIW,” tukas Emil.

Selain Bendungan Tugu, Kementerian PUPR juga menyerahkan sementara aset tempat istirahat terpadu Rambut Siwi kepada Pemerintah Kabupaten Jembrana, Bali. Tempat istirahat itu akan menjadi rujukan dalam pengembangan fasilitas serupa di lima kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN).

Hadi mengatakan tempat istirahat Rambut Siwi menjadi pionir pembangunan tempat istirahat di jalan bukan tol, mengingat kebanyakan fasilitas tempat istirahat lebih banyak dijumpai di jalan tol karena menjadi salah satu standar pelayanan operator. (Aprianus

Doni T/Rivki Maulana)

Judul	Tol di Riau Beroperasi Maret 2020	Tanggal	Selasa, 3 Desember 2019
Media	Media Indonesia Halaman 10		
Resume	Tol ruas Pekanbaru-Dumai Riau, sepanjang 131 kilometer (km) siap beroperasi penuh pada maret 2020. Di sekitar tol dibangun enam pelintasan gajah karena daerah tersebut merupakan wilayah jelajah gajah.		

Tol di Riau Beroperasi Maret 2020

Tol Trans-Sumatra yang dibangun PT Hutama Karya hingga kini mencapai 469,5 km. Di 2024 tol Lampung-Aceh sepanjang 2.765 km akan tersambung.

RUDI KURNIAWANSYAH
rudi@mediaindonesia.com

TOL ruas Pekanbaru-Dumai, Riau, sepanjang 131 kilometer (km) siap beroperasi penuh pada Maret 2020. Di sekitar tol dibangun enam pelintasan gajah karena daerah tersebut merupakan wilayah jelajah gajah. "Panjang seluruh ruas tol Pekanbaru-Dumai terbagi menjadi enam seksi, dengan progres pembangunan konstruksi rata-rata mencapai 77%. Seksi 1 sepanjang 9,5 km insya Allah bisa selesai akhir 2019 ini," kata Sekretaris Perusa-

haan PT Hutama Karya (persero) Muhammad Fauzan, kemarin.

Menurutnya, saat ini seksi 2, 3, dan 4 masih dalam tahap penyelesaian pembebasan lahan. Pembebasan lahan seksi 5 dan 6 telah selesai sehingga pembangunan konstruksi dapat dikebut.

Enam pelintasan gajah yang dibangun PT Hutama Karya berada di seksi 4, yaitu wilayah Kandis Utara dan Duri Selatan.

Fauzan menjelaskan Riau memiliki populasi gajah sumatra yang merupakan satwa dilindungi dan kini tersisa 210 ekor. Setelah pembangunan rampung, pelintasan gajah

akan dinaturalisasi, dikembalikan seperti semula, dengan ditanami tanaman yang disukai gajah.

Sementara itu, pembangunan konstruksi ruas tol Pekanbaru-Padang sepanjang 255 km telah dimulai, tepatnya pada ruas Padang-Sicincin (seksi 5) sepanjang 29 km. "Saat ini dalam tahap pembebasan lahan dan diharapkan pada 2020 kita dapat melakukan pembangunan konstruksi penuh," terangnya.

Adapun ruas tol paling atas di Sumatra, yakni Sigli-Banda Aceh sepanjang 74 km, saat ini masih dalam tahap pembebasan lahan dan pembangunan konstruksi.

Fauzan menuturkan pembebasan lahan di seksi 4 sepanjang 13,5 km ruas Indrapuri-Blangbintang hampir tuntas sehingga konstruksinya ditargetkan selesai pada akhir tahun ini.

Hingga saat ini, Hutama Karya telah membangun 469,5 km Tol Trans-Sumatra, sepanjang 179 km di antaranya sudah beroperasi penuh, yakni Bakauheni-Terbanggi Besar sepanjang 140 km, ruas Medan-Binjai beroperasi sebagian sepanjang 13 km, dan ruas Palembang-Indralaya sepanjang 22 km. Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung sepanjang 189 km masih beroperasi tanpa berbayar.

Peresmian ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung menambah panjang ruas Tol Trans-Sumatra yang beroperasi. Dengan adanya ruas tol Bakauheni-Terbanggi Besar sepanjang 140 km, Lampung hingga Kayu Agung, Palembang, kini dapat ditempuh dalam waktu 4-5 jam.

Hutama Karya juga terus membangun ruas-ruas prioritas lain-

nya sehingga pada 2024 tol dari Lampung-Aceh sepanjang 2.765 km yang terdiri atas 24 ruas dapat tersambung dan beroperasi penuh.

JJLS DIY

Pembangunan infrastruktur jalan juga terus dilakukan di Pulau Jawa. Pengerjaan jalan jalur lintas selatan (JJLS) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang digarap sejak 2005 masih terus berlangsung sampai saat ini.

Selain menghubungkan wilayah Jawa Timur dengan Jawa Tengah, juga akan ada infrastruktur ikon JJLS di wilayah DIY, yakni Luk (Kelok) 18.

"Pembangunan jalan Luk 18 akan dimulai 2020," terang Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Meneral (PUP-ESDM) DIY, Bambang Sugaib. (AT/DY/PO/FB/N-1)

Judul	Giliran BUMN Jadi Fasilitator di Infrastruktur	Tanggal	Selasa, 3 Desember 2019
Media	Media Indonesia Halaman 14		
Resume	Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menyebut kebutuhan pembiayaan infrastruktur di Indonesia tidak lagi hanya dapat dipenuhi sektor publik.		

Giliran BUMN Jadi Fasilitator di Infrastruktur

DEPUTI Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menyebut kebutuhan pembiayaan infrastruktur di Indonesia tidak lagi hanya dapat dipenuhi sektor publik.

Menurutnya, sumber keuangan tradisional seperti perbankan menjadi terbatas karena kendala kehati-hatian.

"Dengan demikian, sudah saatnya bagi sektor swasta untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur," ujar Destry dalam seminar bertema *Peran penting pembiayaan infrastruktur untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan*, di Gedung BI, kemarin.

Ia melanjutkan, ada hal-hal yang perlu diperbaiki untuk lebih merangsang investasi swasta, antara lain, penguatan sinergi dan koordinasi kebijakan antara pejabat, lembaga, serta pemerintah pusat dan daerah.

"Data dan informasi infrastruktur di daerah juga harus terintegrasi dengan baik dan kualitas persiapan proyek ditingkatkan dengan lebih baik," imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, pakar pendanaan infrastruktur Bank

Dunia, Jeff Dellmon, menyebut bahwa dalam lima tahun ini Indonesia telah mengalami banyak kemajuan di bidang infrastruktur.

"Indonesia sudah memiliki pertumbuhan infrastruktur yang cepat dan fenomenal, tapi masih jauh dari yang kita inginkan untuk mendapat manfaat yang kita inginkan," ujarnya.

Menurutnya, Indonesia bisa lebih cepat lagi dalam pembangunan infrastruktur supaya manfaatnya lebih bisa dirasakan. Dalam hal ini, pembiayaan dari swasta diperlukan supaya tidak terlalu mengandalkan APBN dan pembiayaan dari BUMN.

"Lima tahun ke depan kita akan melihat meningkatnya ekspektasi dari sektor swasta, proyek mana yang baik untuk sektor swasta," katanya.

Ia menyarankan agar pemerintah tidak terlalu mengandalkan BUMN dalam pembiayaan proyek infrastruktur. Ia menyebut BUMN bisa menjadi fasilitator untuk mendapatkan pembiayaan dari sektor swasta.

"Ini merupakan pergeseran yang sulit. Paling tidak (saran) dari World Bank, BUMN (harus) bergeser dari solusi menjadi fasilitator dari solusi," imbuhnya. (Ifa/E-1)

Judul	Berita Foto	Tanggal	Selasa, 3 Desember 2019
Media	Bisnis Indoensia Halaman 21		
Resume	Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kanan) Bersama Menteri perhubungan Budi Karya Sumadi (kedua kanan), Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas) Marsekai Madya TNI Bagus Puruhito (kiri) dan Sekretaris Utama BMKG Dwi Budi Sutrisno (kedua kiri) mengikuti Rapat Kerja dengan komisi V DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/12). Raker tersebut membahas kesiapan infrastruktur dan transportasi dalam rangka persiapan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020.		

► **PERSIAPAN TRANSPORTASI NATAL**



Antara/Gaith Pradipta

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (*kanan*) bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (*kedua kanan*), Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas) Marsekal Madya TNI Bagus Puruhito (*kiri*) dan Sekretaris Utama BMKG Dwi Budi Sutrisno (*kedua*

kiri) mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/12). Raker tersebut membahas kesiapan infrastruktur dan transportasi dalam rangka persiapan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020.

Judul	Berlomba Lewat Mitra Asing	Tanggal	Selasa, 3 Desember 2019
Media	Bisnis Indonesia Halaman 23		
Resume	Tak ingin di anggap sekedar latah untuk mengikuti tren yang berkembang, para pengembangan property juga menunjukkan keserikusannya membangun kota pintar dengan menggandeng perusahaan teknologi yang dianggap lebih berpengalaman, di antaranya adalah PT Lippo Karawaci TBK,, Indonesia Tbk,, Dan PT Sirius Surya Sentosa.		

► KONSEP KOTA PINTAR

Berlomba Lewat Mitra Asing

Pengembangan kawasan yang mengadopsi konsep kota pintar atau *smart city* kian populer di kalangan pengembang properti. Mereka berlomba-lomba membuat proyek hunian berkonsep kota pintar yang dikembangkannya sebagai yang terbaik di Indonesia, bahkan di level dunia.

Fitri Sartina Dewi
fitri.sartinadewi@bisnis.com

Tak ingin dianggap sekedar latah untuk mengikuti tren yang berkembang, para pengembang properti juga menunjukkan keseriusannya membangun kota pintar dengan menggandeng perusahaan teknologi yang dianggap lebih berpengalaman, di antaranya adalah PT Sinar Mas Land, PT Lippo Karawaci Tbk., Indonesia Tbk., dan PT Sirius Surya Sentosa.

Melalui kerja sama yang dijalin, pengembang berharap kota pintar yang dikembangkannya bisa menjadi contoh dalam menghadirkan solusi terkait isu perkotaan bagi negara-negara lainnya. Misalnya, Lippo Karawaci yang ingin menjadikan Lippo Village sebagai pusat aplikasi teknologi dan penelitian di Asia Tenggara.

Untuk mewujudkan ambisi tersebut, Lippo menggandeng Softbank Corp., perusahaan di Jepang yang dikenal memiliki pengalaman di bidang teknologi dan telekomunikasi.

► Kerja sama yang dijalin dengan perusahaan teknologi asing ternama dilakukan sebagai salah satu strategi pemasaran untuk menargetkan segmen pasar milenial yang melek teknologi.

CEO Lippo Karawaci John Riady mengungkapkan melalui kerja sama dengan Softbank, pihaknya akan menjalankan proyek pengembangan digitalisasi pada Lippo Village dengan mengembangkan solusi ekosistem berbasis *artificial intelligence* (AI) dan *Internet of Things* (IoT).

"Di Lippo Village, kami bermaksud menerapkan teknologi IoT melalui *smart cluster management*, dan *smart traffic management*," ujarnya belum lama ini.

Lantas, apa saja sebenarnya fungsi dari teknologi yang akan diadopsi pada Lippo Village? Vice President & Head of Global Business Strategy Softbank Hidebumi Kitahara menjelaskan *smart traffic management* ialah mode *closed circuit television* (CCTV) pintar yang memiliki kemampuan untuk menghitung jumlah kendaraan yang masuk ke dalam kawasan.

"Teknologi tersebut juga nantinya mampu mengidentifikasi dan membedakan jenis-jenis kendaraan seperti truk, bus, sedan, sepeda motor, dan kendaraan lainnya." Strategi menggandeng perusahaan asal Jepang untuk pengembangan kota pintar juga dijalankan PT Sirius Surya Sentosa melalui proyeknya, yaitu Vasanta Innopark. Untuk mengembangkan kawasan yang berlokasi di Cikarang itu, pengembang menjalin kerja sama dengan

Mitsubishi Corporation dengan membentuk anak usaha PT Diamond Development Indonesia.

Presiden Komisaris PT Sirius Surya Sentosa Agnus Suryadi menyatakan teknologi yang akan digunakan pada kawasan tersebut sepenuhnya akan disiapkan oleh perusahaan Jepang itu. Adapun, solusi teknologi yang dihadirkan antara lain hunian dengan standar keamanan tingkat tinggi, *smart home*, dan beberapa teknologi lainnya.

"Untuk teknologi akan diperhatikan oleh Mitsubishi, kami yakin mereka akan memberi pilihan teknologi yang terbaik," ujarnya.

Sementara itu, Sinar Mas Land memilih bekerja sama dengan perusahaan multinasional asal Amerika Serikat yaitu Microsoft untuk mengembangkan proyek kota pintar yang disebut Digital Hub di BSD City, Tangerang Selatan, Banten.

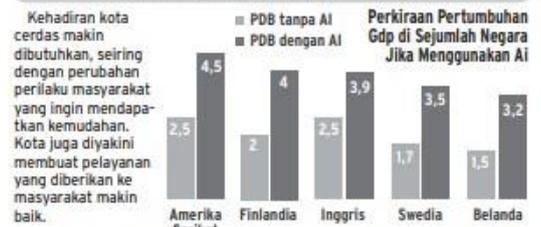
Proyek tersebut nantinya akan dibangun mirip dengan Silicon Valley di San Francisco Bay Area, Amerika Serikat yang di dalamnya terdapat kantor pusat Facebook, Twitter, Google, dan lainnya.

CEO Technology Business Sinar Mas Land Irvan Yasni menyatakan proyek yang dijuluki Silicon Valley Indonesia itu akan menjadi tempat berkumpulnya perusahaan-perusahaan digital raksasa, *startup*, pusat penelitian dan riset, pusat edukasi berbasis IT dan kreatif industri.

Menurut Irvan, konsep kota pintar tidak hanya sekadar pemanfaatan teknologi yang canggih dan kecepatan koneksi internet, tetapi juga harus memperhatikan aspek efisiensi energi dan keamanan.

"Kami akan menggunakan perangkat dengan konsumsi daya yang rendah dan menggunakan energi dari sumber terbarukan

Berkah Kota Cerdas



58% masyarakat menyatakan lebih mempercayai pemerintahan jika layanan pemerintahannya menggunakan digital.



62% pemerintah daerah mengaku ingin menuju ke digital namun ada kendala dari sisi anggaran.



1 dari 4 orang menyatakan bahwa ingin agar layanan dapat diakses lewat gawai.



96 juta jam per tahun bisa dihemat jika pemerintah melakukan transformasi ke proses otomatisasi.



seperti tenaga matahari, angin, dan air," ujarnya.

SEKADAR BELI ALAT

Sebenarnya apa yang membuat para pengembang lebih mempercayakan penerapan teknologi pada kawasan kota pintar yang dikembangkannya kepada para mitra asing?

Senior Director Leads Property Darsono Tan mengatakan para pengembang memilih bekerja sama dengan perusahaan asing, karena mereka mengharapkan merek yang sudah kuat dan ternama yang dimiliki perusahaan asing tersebut untuk membuat produk properti yang

dipasarkan semakin laris manis.

"Sebenarnya kerja sama yang dijalin itu adalah pengembang membeli perangkat lunak dari *brand* tersebut dan memakainya di perumahan yang mereka bangun. Jadi dengan demikian kerja sama yang terjalin lebih banyak yang hanya untuk memakai produk *brand* perusahaan asing tersebut," katanya kepada *Bisnis*, Senin (2/12).

Kerja sama yang dijalin dengan perusahaan teknologi asing ternama, katanya, dilakukan sebagai salah satu strategi pemasaran untuk menargetkan segmen pasar milenial yang melek teknologi. ■

Judul	Dana Talangan FLPP Segera Cair	Tanggal	Selasa, 3 Desember 2019
Media	Bisnis Indonesia Halaman 23		
Resume	Dana talangan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) senilai Rp2 Triliun sudah siap digulirkan dari PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) sebagai bank penyaluran ke pengembang.		

► PEMBIAYAAN PERUMAHAN BERSUBSIDI

Dana Talangan FLPP Segera Cair

Bisnis, JAKARTA — Dana talangan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) senilai Rp2 triliun sudah siap digulirkan dari PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) sebagai bank penyalur ke pengembang.

Executive Vice President Bank BTN Suryanti Agustinar mengatakan bahwa kemungkinan FLPP mulai dicairkan pada awal Desember. Adapun, pengembang yang dipilih merupakan pengembang yang produknya sudah siap diadakan.

"Kami baru buat PKO [Perjanjian Kerja sama Operasional] dengan REI [Persatuan Perusahaan Real estat Indonesia] dan Kementerian PUPR [Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat], dalam waktu dekat semoga sudah bisa direalisasikan," katanya pekan lalu.

Saat ini, BTN sedang melakukan pendataan pengembang sebagai debitur yang proyek dan unitnya siap diadakan. Hal ini disebut agar realisasi dana lancar dan untuk mencegah kekurangan dana lebih lanjut, karena dana talangan yang ada jumlahnya terbatas.

"Supaya tidak timbul masalah lagi, karena BTN tidak cuma jadi penyedia

KPR, tapi juga untuk biaya konstruksi. Kalau ada hambatan di pengembang, ya jadi masalah juga untuk kami [BTN]," imbuh Suryanti.

Ketua Umum REI yang baru terpilih, Paulus Totok Lusida menambahkan terlaksananya PKO tersebut menjadi kelegaan bagi pengembang, artinya tambahan FLPP bisa segera berjalan dan terserap hingga tak tersisa tahun depan.

"Kalau tersisa, nanti tahun depan dikurangi lagi kuotanya, karena dikira tahun ini kelebihan. Padahal kebutuhan akan pembiayaan subsidi ini bertambah terus. Sekarang *kan* lagi fokus untuk merealisasikan BP2BT [Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan], ini diharapkan bisa diandalkan pada 2020," ungkap Totok.

Selain itu, lanjutnya, pihaknya akan mengawal dana FLPP tahun depan dan PKO (Perjanjian Kerja sama Operasional) antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pengembang, dan perbankan.

Totok menambahkan, pengembang besar yang tergabung dalam anggota REI hanya 10%, tetapi dia juga akan memastikan dan mengawal hunian berimbang dengan konsep *omnibus*

law yang juga tengah digadag-gadag oleh pemerintah.

Hal itu agar pengembangan hunian sederhana atau bersubsidi bisa dilakukan di daerah dan ada kolaborasi pengembang besar dan pengembang daerah.

"Dengan begitu pengembang daerah bisa menambah kapasitas dan memang itu gunanya organisasi. Saya mewakafkan diri saya tiga tahun ke depan untuk berkembang bersama teman-teman," imbuhnya.

Mantan Ketua Umum REI Soelaeman Soemawinata mengatakan asosiasi itu tengah mengusahakan agar kuota rumah subsidi tahun 2020 bisa ditambah. Pemerintah melalui Kementerian PUPR mengatakan akan menganggarkan untuk 110.000 unit pada 2020.

Soelaeman mengatakan agar kuota yang dianggarkan bisa ditambah menjadi 300.000 unit, dari berbagai skema, termasuk BP2BT dan juga Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) yang seharusnya sudah mulai bisa beroperasi.

"Usulannya sudah disampaikan, responsnya dari pemerintah juga sangat baik," katanya. (Mutia Nabila)